

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP BELANJA MODAL KABUPATEN DAN KOTA JAWA TIMUR TAHUN 2019-2021

Ibnu Anggun Priyono¹, Husnul Khotimah^{2*}

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Bisnis dan Humaniora, Universitas Trilogi, Jakarta,
Indonesia

ibnu.priyono@gmail.com¹, husnulhotimah@trilogi.ac.id^{2*}

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal di Provinsi Jawa Timur. Objek penelitian terdiri dari 38 Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Timur periode 2019 - 2021 yang dapat diakses melalui website resmi di www.djpk.kemenkeu.go.id. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat data sekunder dan metode pemilihan sampel menggunakan metode sampling jenuh. Langkah pengujian diimplementasikan dengan pendekatan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal, Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif terhadap belanja modal, dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap belanja modal. Pemerintah daerah perlu untuk merumuskan strategi anggaran belanjanya agar dapat daerah otonom dapat mengelolanya dengan efektif, efisien dan ekonomis.

Kata Kunci: Belanja Modal; Dana Alokasi Khusus; Dana Alokasi Umum; Pendapatan Asli Daerah

ABSTRACT

This research aims to analyze the influence of Regional Original Income, General Allocation Funds, and Special Allocation Funds on Capital Expenditures in East Java Province. The research objects consist of 38 cities and regencies in East Java Province for the 2019 - 2021 period which can be accessed via the official website at www.djpk.kemenkeu.go.id. The data used in this research is secondary data and the sample selection method uses a saturated sampling method. The testing steps were implemented using a multiple linear regression analysis approach. The research results show that Regional Original Income has a positive effect on Capital Expenditures, General Allocation Funds have a negative effect on capital expenditures, and Special Allocation Funds have a positive effect on capital expenditures. Regional governments need to formulate budget strategies so that autonomous regions can manage them effectively, efficiently and economically.

Keywords: Capital Expenditures; Special Allocation Fund; General Allocation Fund; Locally-Generated Revenue

Histori artikel:

Diunggah: 21-11-2023

Direview: 07-12-2023

Diterima: 13-12-2023

Dipublikasikan: 15-12-2023



* Penulis korespondensi ✉

PENDAHULUAN

Pelaksanaan otonomi daerah telah memberikan daerah kekuasaan yang sangat luas. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah didefinisikan sebagai suatu hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan kebijakan aturan undang-undang yang berlaku. Dengan berlakunya Undang-Undang Otonomi Daerah yang melimpahkan segala kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, maka pengelolaan anggaran sektor publik dikelola oleh pemerintah daerah masing-masing. Pemerintah Daerah diharapkan mampu atau mandiri di dalam membiayai kegiatan pemerintah daerahnya dengan tingkat ketergantungan yang presentasinya lebih kecil kepada Pemerintah Pusat sehingga Pendapatan Asli Daerah harus menjadi bagian yang terbesar dalam memobilisasi dana penyelenggaraan Pemda (Hadi & Khotimah, 2022).

Untuk mewujudkan tercapainya tujuan otonomi daerah, setiap daerah perlu menelaah lebih lanjut proporsi anggaran dari setiap belanja dengan efisien. Proporsi belanja ditentukan dari misi dan program yang dijalankan daerah tersebut pada tahun anggaran tertentu. Proporsi anggaran belanja ini telah diatur dalam Undang-Undang Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah (HKPD). Dalam undang-undang tersebut ditekankan bahwa porsi belanja modal paling sedikit adalah 40%. Ketentuan tersebut mengisyaratkan bahwa daerah harus mengupayakan kegiatan yang memiliki manfaat jangka panjang.

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Belanja modal digunakan untuk menambah aset tetap atau investasi yang ada sehingga akan memberikan manfaatnya sendiri. Di dalam struktur APBD, belanja modal berada pada urutan setelah belanja operasi yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial (Marliana et al., 2022).

Selain belanja, otonomi daerah juga dimaksudkan agar setiap daerah mengoptimalkan penerimaan mereka. (Afriezal, 2023) menyatakan bahwa setiap daerah mempunyai kemampuan berbeda-beda untuk mendanai kegiatan operasionalnya. Hal tersebut dapat menimbulkan adanya kesenjangan keuangan yang berimbas pada kesenjangan pembangunan antar daerah. Agar tidak terjadi kesenjangan, maka masing-masing pemerintah daerah perlu melakukan kebijakan otonomi daerah dan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Penelitian ini berupaya untuk melihat bagaimana perimbangan keuangan daerah dilakukan. Penerimaan daerah diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dana Perimbangan merupakan dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Beberapa peneliti menemukan hubungan yang berbeda atas penerimaan dan belanja ini. Penelitian (Hairiyah et al., 2017) menyatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal, sedangkan hasil penelitian (Adyatma & Oktaviani, 2015) menyatakan bahwa pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Menurut Suryana (2018) dana alokasi umum berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal, sedangkan hasil penelitian Aditya & Dirgantari (2017) menyatakan bahwa dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Menurut Marliana et al. (2022) dana alokasi khusus berpengaruh positif terhadap belanja modal, sedangkan hasil penelitian Widajantie (2021) menyatakan bahwa dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

Perbedaan dalam beberapa penelitian di atas mendorong dilakukannya penelitian ini dengan mengambil sampel provinsi yang memiliki kabupaten/kota terbanyak di Indonesia yaitu Provinsi Jawa Timur. Provinsi Jawa Timur otomatis memiliki daerah otonom yang banyak

sehingga menarik untuk melihat secara keseluruhan bagaimana daerah-daerah ini mengelola Belanja Modalnya. Berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Modal Kabupaten Dan Kota Jawa Timur Tahun 2019-2021”.

TINJAUAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Belanja Modal

Pengertian Belanja Modal menurut Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1(satu) periode akuntansi. (Halim & Kusufi, 2014) menyebutkan bahwa yang termasuk dalam Belanja Modal adalah:

- 1) Belanja Modal Tanah;
- 2) Belanja Peralatan dan Mesin;
- 3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
- 4) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan;
- 5) Belanja Aset Tetap Lainnya; dan
- 6) Belanja Aset Lainnya.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan menyatakan bahwa pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang terus dipacu peningkatannya agar dapat dimanfaatkan secara optimal mungkin untuk kepentingan pemerintah daerah. Menurut Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sumber PAD adalah:

1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah yang terbagi menjadi tiga yakni retribusi jasa umum dan retribusi jasa usaha serta retribusi perizinan tertentu.

Dana Alokasi Umum

Dana alokasi umum adalah transfer dana yang bersifat “block grant”, artinya ketika dana tersebut diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, maka pemerintah daerah bebas untuk menggunakan dan mengalokasikan dana ini sesuai prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah sehingga pemerintah daerah mempunyai keleluasaan di dalam penggunaan dana alokasi umum sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masing-masing daerah (Halim & Kusufi, 2014). Prinsip Dasar Dana Alokasi Umum yaitu:

1. Prinsip Kecukupan
2. Prinsip Netralitas dan Efisiensi
3. Prinsip Akuntabilitas
4. Prinsip Relevansi
5. Prinsip Keadilan
6. Prinsip Objektivitas dan Transparansi
7. Prinsip Kesederhanaan

Dana Alokasi Khusus

Menurut Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dana alokasi khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan

khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Kriteria Pengalokasian Dana Alokasi Khusus:

1. Kriteria Umum, dirumuskan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja pegawai negeri sipil daerah.
2. Kriteria khusus, dirumuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus dan karakteristik daerah.
3. Kriteria teknis, disusun berdasarkan indikator-indikator kegiatan khusus yang akan didanai dari DAK.

Pengembangan Hipotesis

Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal

Penelitian yang dilakukan oleh (Ernayani, 2017), (Huda & Sumiati, 2019), (Surakhman et al., 2019) dan didukung penelitian (Marliana et al., 2022) menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Hal ini berarti semakin banyak jumlah pendapatan asli daerah maka semakin tinggi pula pengeluaran belanja modal yang dilakukan pemerintah. Dengan peningkatan PAD diharapkan mampu memberikan efek positif terhadap anggaran belanja modal oleh pemerintah. Oleh sebab itu, hipotesis yang dirumuskan adalah:

H_1 = Pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal

Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal

Penelitian yang dilakukan oleh (Suryana, 2018), (Huda & Sumiati, 2019), dan didukung penelitian (Marliana et al., 2022) menunjukkan bahwa dana alokasi umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Pengaruh tersebut disebabkan karena adanya DAU dari pemerintah pusat sehingga pemerintah daerah mampu mengalokasikan pendapatannya tersebut untuk membiayai belanja modal, sehingga semakin besar DAU maka akan semakin besar pula belanja modal daerah tersebut, oleh sebab itu, hipotesis yang dirumuskan adalah:

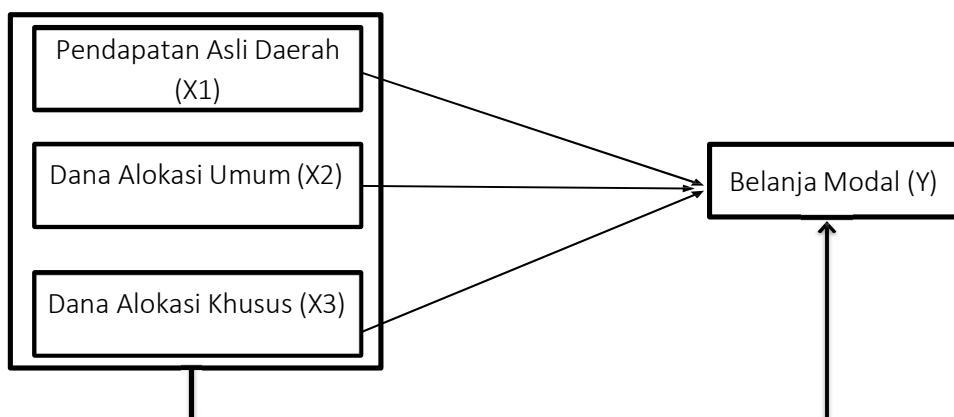
H_2 = Dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap belanja modal

Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal

Penelitian yang dilakukan oleh (Ernayani, 2017) dan (Simbolon et al., 2020) menunjukkan bahwa dana alokasi khusus berpengaruh positif terhadap belanja modal. Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan prioritas dari daerah dan nasional. Oleh sebab itu, hipotesis yang dirumuskan adalah:

H_3 = Dana alokasi khusus berpengaruh positif terhadap belanja modal

Studi kasus penelitian ini mengimplementasikan variabel dependen yaitu belanja modal dan variabel independen yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus studi kasus Provinsi Jawa Timur Periode 2019- 2021 untuk dilakukan tahapan pengujian, sehingga dapat dirumuskan kerangka konseptual sebagai berikut :



Gambar 1. Kerangka Konseptual

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian kuantitatif dengan data sekunder. Penelitian kuantitatif yaitu observasi demi mendapatkan data statistik berupa angka-angka. Penelitian ini memiliki jumlah sampel sebesar 38 Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Timur periode 2019-2021. Penarikan suatu sampel yang dipilih pada studi kasus penelitian ini yakni sampel jenuh, yang didefinisikan sebagai suatu penarikan sampel di mana seluruh bagian dari populasi menjadi bagian dari sampel itu sendiri. Tahap Analisis data terdiri dari serangkaian tahapan pengujian seperti pengujian analisis regresi berganda atau OLS dan pengujian terkait asumsi klasik agar memenuhi standar BLUE dan lolos dari penyimpangan asumsi klasik seperti uji normalitas, heteroskedastisitas, autokorelasi dan multikolinearitas. Kemudian tahapan terakhir dengan pengujian hipotesis yakni uji koefisien determinasi, uji -t dan uji-F.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 1. Hasil Statistik Deskriptif

	Mean	Maximum	Minimum	Std. Dev.
Belanja Modal	301.112.136.598	2.754.304.824.082	69.347.557.336	161.973.901.891
PAD	297.218.656.137	5.381.920.253.810	131.837.253.810	199.418.231.225
DAU	934.542.700.500	1.765.927.493.000	367.576.298.000	348.566.167.319
DAK	312.209.085.145	595.626.071.360	58.703.847.027	116.476.426.524
Observations	114	114	114	114

Dari data statistik deskriptif di atas, dapat diketahui bahwa untuk variabel dependen belanja modal yang diukur dari semua pengeluaran negara menunjukkan nilai minimum sebesar 69.347.557.336, nilai ini dimiliki oleh Kota Probolinggo pada tahun 2021. Nilai maksimum belanja modal sebesar 2.754.304.824.082, dimiliki Kota Surabaya pada tahun 2019. Nilai rata-rata belanja modal sebesar 301.112.136.598, serta nilai standar deviasi belanja modal sebesar 161.973.901.891. Hal ini menunjukkan bahwa secara data statistik selama 2019 – 2021 telah memenuhi standar, nilai rata-rata belanja modal lebih besar dari nilai standar deviasi. Hal ini menunjukkan bahwa penyimpangan data yang terjadi relatif lebih rendah serta memiliki distribusi nilai yang merata.

Variabel pendapatan asli daerah (X1) menunjukkan nilai minimum sebesar 131.837.253.810 dimiliki oleh Kabupaten Gresik pada tahun 2021. Nilai maksimum sebesar 5.381.920.253.810 dimiliki Kota Surabaya pada tahun 2019. Nilai rata-rata sebesar 297.218.656.137 serta nilai standar deviasi sebesar 199.418.231.225. Hal ini menunjukkan bahwa nilai rata-rata pendapatan asli daerah lebih besar dari nilai standar deviasi. Hal ini menunjukkan bahwa penyimpangan data yang terjadi relatif lebih rendah serta memiliki distribusi nilai yang merata.

Dana alokasi umum memiliki nilai minimum sebesar 367.576.298.000 yang berasal dari Kota Mojokerto pada tahun 2021. Di sisi lain, dana alokasi umum memiliki nilai maksimum sebesar 1.765.927.493.000 yang berasal dari Kabupaten Jember pada tahun 2019. Variabel dana alokasi umum (X2) memiliki rata-rata sebesar 934.542.700.500 dengan standar deviasi 348.566.167.319. Nilai rata-rata dana alokasi umum melebihi nilai standar deviasi. Hal ini menunjukkan bahwa penyimpangan data yang terjadi relatif lebih rendah serta memiliki distribusi nilai yang merata.

Dana alokasi khusus memiliki nilai minimum sebesar 58.703.847.027 yang berasal dari Kota Batu pada tahun 2020 dan nilai maksimum sebesar 595.626.071.360 yang berasal dari Kabupaten Malang pada tahun 2019. Variabel dana alokasi khusus (X3) memiliki rata-rata 312.209.085.145 dengan standar deviasi 116.476.426.524. Nilai rata-rata dana alokasi khusus melebihi nilai standar deviasi. Hal ini menunjukkan bahwa penyimpangan data yang terjadi relatif lebih rendah dan memiliki distribusi nilai yang merata.

Hasil Uji Hipotesis

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, terlebih dahulu dilakukan pengujian asumsi klasik yang menunjukkan hasil bahwa data terdistribusi secara normal, bebas dari multikolinieritas, heteroskedastisitas dan autokorelasi. Pengujian metode estimasi model regresi adalah untuk menentukan model mana yang paling tepat untuk digunakan dalam penelitian ini. Estimasi data panel dalam penelitian ini dimulai dengan menentukan model yang terbaik melalui 3 cara pengujian yaitu Uji Chow, Uji Hausman dan Uji LM-Test. Setelah dilakukan ketiga pengujian tersebut ditemukan bahwa model terbaik yang digunakan ialah *random effect*.

Analisis regresi berganda merupakan analisis yang mengetahui pengaruh lebih dari satu variabel bebas (independen) terhadap satu variabel terikat (dependen). Variabel independen pada penelitian ini yaitu nilai pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Variabel dependen adalah belanja modal.

Tabel 2. Hasil Analisis Regresi Data Panel

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-1.242201	12.48375	-0.099505	0.9210
PAD	0.059057	0.137318	2.430076	0.0484
DAU	-0.131431	0.057908	-2.269642	0.0262
DAK	1.123327	0.447997	2.507441	0.0144

Tabel 2 menunjukkan nilai koefisien dalam persamaan regresi linear berganda. Nilai persamaan yang dipakai yaitu berada pada kolom koefisien. Diperoleh hasil standar persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$BM_{it} = -1.242201 + 0.059057 PAD_{it} - 0.131431 DAU_{it} + 1.123327 DAK_{it} + \varepsilon$$

1) Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi pada dasarnya mengukur kemampuan model untuk menjelaskan perubahan variabel dependen. Nilai koefisien antara nol dan satu ($0 \leq R^2 \leq 1$). Nilai R^2 kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan perubahan variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati 1 menunjukkan variabel independen menyediakan hampir

semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi perubahan variabel dependen (Ghozali, 2018).

Tabel 3. Hasil Uji Koefisien Determinasi

R-squared	0.794789	Mean dependent var	26.31991
Adjusted R-squared	0.682345	S.D. dependent var	0.535889

Berdasarkan Tabel 3 dapat diketahui bahwa nilai *Adjusted R-Square* sebesar 0.682345 artinya secara bersama-sama pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus berkontribusi terhadap belanja modal sebesar 68.23 persen, sedangkan sisanya sebesar 31.77 persen dipengaruhi oleh variabel diluar model penelitian ini.

2) Uji t

Uji t pada dasarnya menunjukkan besarnya pengaruh suatu variabel penjelas atau variabel independen dalam menjelaskan perubahan pada variabel dependen (Ghozali, 2018).

Tabel 4. Hasil Analisis Uji t

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-1.242201	12.48375	-0.099505	0.9210
PAD	0.059057	0.137318	2.430076	0.0484
DAU	-0.131431	0.057908	-2.269642	0.0262
DAK	1.123327	0.447997	2.507441	0.0144

Berdasarkan Tabel 4 dapat diketahui jumlah pengamatan sebanyak ($n = 114$), jumlah variabel independen sebanyak ($k = 3$), maka *degree of freedom* (df) = $n-k-1$ yaitu $114-3-1 = 110$ dengan tingkat signifikansi sebesar 0,05 maka t tabel adalah 1.98177. Berdasarkan hasil uji parsial (*T-test*) maka terlihat bahwa.

1. Hasil uji variabel pendapatan asli daerah (X1), menunjukkan nilai t-hitung lebih besar daripada t-tabel yaitu dengan nilai $2.430076 > 1.98177$ serta nilai probabilitasnya lebih kecil dari tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$ yaitu dengan nilai $0.0484 < 0,05$. Dapat disimpulkan bahwa variabel pendapatan asli daerah secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap variabel belanja modal. Dengan kata lain hipotesis pendapatan asli daerah (X1) berpengaruh positif terhadap belanja modal (Y) diterima.
2. Hasil uji variabel dana alokasi umum (X2), menunjukkan nilai t-hitung lebih kecil daripada t-tabel yaitu dengan nilai $-2.269642 < 1.98177$ serta nilai probabilitasnya lebih kecil dari tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$ yaitu dengan nilai $0.0262 < 0,05$. Dapat disimpulkan bahwa dana alokasi umum secara parsial berpengaruh negatif signifikan terhadap variabel belanja modal. Dengan kata lain hipotesis dana alokasi umum (X2) berpengaruh positif terhadap belanja modal (Y) ditolak, sebab hasil penelitian tersebut berpengaruh negatif terhadap variabel belanja modal.
3. Hasil uji variabel dana alokasi khusus (X3), menunjukkan nilai t-hitung lebih besar daripada t-tabel yaitu dengan nilai $2.507441 > 1.98177$ serta nilai probabilitasnya lebih besar dari tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$ yaitu dengan nilai $0.0144 < 0,05$. Dapat disimpulkan bahwa variabel dana alokasi khusus secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap variabel

belanja modal. Dengan kata lain hipotesis dana alokasi khusus (X3) berpengaruh positif terhadap belanja modal (Y) diterima.

3) Uji F

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan bahwa semua variabel independen atau variabel bebas yang termasuk dalam model mempunyai pengaruh yang sama terhadap variabel dependen atau variabel terikat (Ghozali, 2018).

Tabel 5. Hasil Analisis Uji F

F-statistic	7.068303
Prob(F-statistic)	0.000000

Berdasarkan Tabel 4.12 diperoleh F hitung sebesar 7.068303 dengan *p-value* F-statistik sebesar 0.000000. Berdasarkan F tabel didapat nilai 2.69 dengan $df_1 = (k-1) = (4-1) = 3$ dan $df_2 = (n-k) = (114-4) = 110$ dengan derajat kebebasan $\alpha = 0.05$ ($\alpha=5\%$). Hal ini berarti $F_{hitung} \geq F_{tabel}$ atau sama dengan $7.068303 \geq 2.69$ dengan nilai *p-value* F statistik < 0.05 atau sama dengan $0.000000 < 0.05$, yang memiliki arti bahwa variabel independen yaitu nilai pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu belanja modal.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal

Hipotesis 1 yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah (X1) berpengaruh positif terhadap belanja modal (Y) diterima. Hal ini kemungkinan disebabkan karena PAD merupakan sumber pendapatan yang diperoleh dari daerah itu sendiri berupa pajak daerah, redistribusi daerah yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. PAD juga merupakan sumber pembelanjaan daerah, sehingga jika PAD meningkat maka dana yang dimiliki pemerintah daerah akan lebih tinggi dan tingkat kemandirian daerah akan meningkat pula, sehingga pemerintah daerah akan berinisiatif untuk lebih meningkatkan belanja modalnya untuk melengkapi sarana prasarana pembangunan daerah guna meningkatkan pelayanan publik.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dianalisis, jika setiap pembuatan rincian Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), belanja modal diwajibkan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dari masing-masing daerah, termasuk di Provinsi Jawa Timur dengan mempertimbangkan Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh atau diterima, sehingga tiap Pemerintah Daerah berkeinginan untuk mencapai tingkat belanja modal yang maksimal atau mengalami peningkatan dalam belanja modal guna memaksimalkan pelayanan yang bersifat publik dan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Implikasinya, para pemerintah daerah harus mengeksplorasi Pendapatan Asli Daerah yang sebesar-besarnya.

Dari tahun 2019-2021 pendapatan asli daerah dan belanja modal Provinsi Jawa Timur mengalami fluktuasi yang disebabkan adanya Covid-19. Pada tahun 2020 saat pandemi Covid-19 realisasi belanja modal mengalami penurunan cukup drastis dibandingkan dengan tahun sebelumnya meskipun pada tahun 2021 realisasi belanja modal mengalami sedikit kenaikan.

Penelitian ini sejalan dan konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ernayani, 2017), (Huda & Sumiati, 2019), (Surakhman et al., 2019) dan didukung penelitian (Marliana et al., 2022) yang menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal. Pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap belanja modal artinya semakin banyak jumlah pendapatan asli daerah maka semakin tinggi pula pengeluaran belanja modal yang dilakukan pemerintah.

Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal

Hipotesis 2 yaitu Dana alokasi umum (X2) berpengaruh positif terhadap belanja modal

(Y) ditolak. Hasil ini menjelaskan bahwa dana alokasi umum yang besar akan cenderung memiliki belanja modal rendah. Hal ini terjadi karena setiap transfer DAU yang diterima daerah akan ditujukan untuk belanja pemerintah daerah. Dana alokasi umum digunakan untuk membiayai belanja yang lain seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja lainnya. Pemerintah daerah dapat menentukan skala prioritas dalam alokasi anggaran tersebut.

Hasil tersebut menjelaskan bahwa Provinsi seperti Jawa Timur pada periode 2019-2021 yang menerima DAU yang paling tinggi biasanya memiliki belanja modal yang rendah. DAU tersebut digunakan untuk membiayai pengeluaran lain seperti pengeluaran pribadi, barang dan jasa, serta pengeluaran lainnya. Padahal, daerah yang distribusi pendapatannya tinggi umumnya akan meningkatkan porsi anggaran belanja modal daerah (*capital shopping*). Namun jika dana asli daerah mempunyai kontribusi yang besar, maka Dana Alokasi Umum tidak memberikan kontribusi yang besar, karena jumlah uang yang disesuaikan oleh pemerintah federal tidak dapat ditentukan. Artinya, tingkat otonomi pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan daerahnya, khususnya dari segi anggaran yang bersifat subjektif. Namun hasil penelitian ini sejalan dan konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh (Hairiyah et al., 2017) yang menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh negatif terhadap Belanja Modal.

Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal

Hasil hipotesis dana alokasi khusus (X3) berpengaruh positif terhadap belanja modal (Y) diterima. Hal ini menunjukkan bahwa naiknya nilai Dana alokasi khusus dapat meningkatkan dan berpengaruh terhadap belanja modal. Dikarenakan Dana Alokasi Khusus yang dialokasikan melalui APBN oleh pusat dan diberikan kepada pemda untuk peningkatan keperluan daerah sesuai dengan kebijakan dan program nasional mampu meningkatkan infrastruktur sarana dan prasarana, fasilitas publik melalui peningkatan Belanja Modal. Pemberian bantuan pemerintah pusat melalui Dana Alokasi Khusus untuk pemerintah daerah salah satu tujuannya yaitu membiayai kebutuhan penyediaan sarana dan prasarana fisik terutamanya infrastruktur.

Hasil ini menjelaskan bahwa daerah seperti di Provinsi Jawa Timur yang menerima DAK dalam jumlah besar juga akan mempunyai anggaran yang besar pula. Hasil ini jelas menunjukkan bahwa sumber pendanaan DAK akan memengaruhi proses penganggaran. Uang yang diterima daerah dalam bentuk perencanaan keuangan (*transfer daerah*) dari pusat diperlukan daerah agar dapat berkembang dan memakmurkan masyarakat melalui pengelolaan besaran dan keahlian sumber daya daerah serta pembangunan infrastruktur permanen, salah satunya adalah dengan mengalokasikan anggaran belanja modal. Pemerintah daerah dapat menggunakan saldo anggaran DAK untuk menyelenggarakan pelayanan publik yang dibiayai melalui anggaran. Hasil penelitian ini dipertegas bahwa DAK mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap anggaran belanja modal, sehingga hipotesis penelitian dapat diterima. Penelitian ini sejalan dan konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Ernayani, 2017) dan (Simbolon et al., 2020).

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian terhadap data yang telah dikumpulkan dan dianalisis, maka dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi nilai pendapatan asli daerah yang maka akan semakin tinggi juga nilai belanja modal. Pendapatan asli daerah merupakan sumber pembelanjaan daerah, sehingga jika pendapatan asli daerah meningkat dana yang dimiliki pemerintah daerah akan lebih tinggi dan tingkat kemandirian daerah akan meningkat pula, sehingga pemerintah daerah akan berinisiatif untuk lebih meningkatkan belanja modalnya untuk melengkapi sarana prasarana pembangunan daerah guna meningkatkan pelayanan

publik. Hasil penelitian dana alokasi Umum menunjukkan bahwa semakin tinggi dana alokasi umum maka semakin rendah nilai belanja modal. Hal ini disebabkan karena dana transfer berupa DAU yang diberikan oleh pemerintah pusat tidak semuanya digunakan untuk belanja modal. DAU banyak dialokasikan untuk membiayai belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja lainnya. Sedangkan pengujian dana alokasi khusus menunjukkan bahwa semakin tinggi dana alokasi khusus maka semakin tinggi nilai belanja modal.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, N. Y., & Dirgantari, N. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah Tahun 2013-2015. *Kompartemen*, XV(1), 42–56.
- Adyatma, E., & Oktaviani, R. M. (2015). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Pemoderasi. *Dinamika Akuntansi, Keuangan Dan Perbankan*, 4(2), 190–205.
- Afriezal, W. A. D. (2023). Pengaruh PAD, DAU, DAK Dan SiLPA Terhadap Belanja Langsung Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 12(4), 1–17. <https://ci.nii.ac.jp/naid/40021243259/>
- Ernayani, R. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah (Studi Kasus pada 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Periode 2009-2013). *JSHP (Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan)*, 1(1), 43. <https://doi.org/10.32487/jshp.v1i1.234>
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25* (9th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hadi, I., & Khotimah, H. (2022). Analisis Rasio Keuangan Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Pulau Jawa Dan Sumatera. *Trilogi Accounting and Business Research*, 3(2), 213–222. <https://doi.org/10.31326/tabv.v3i2.1409>
- Hairiyah, Malisan, L., & Fakhroni, Z. (2017). Pengaruh DAU, DAK dan PAD terhadap Belanja Modal. *Journal.Feb.Unmul.Ac.Id/Index.Php/KINERJA*, 14(2), 85–91.
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2014). *Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat.
- Huda, S., & Sumiati, A. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah. *Jurnal Wahana Akuntansi*, 14(1), 85–100.
- Marliana, R., Prasetyo, A. S., & Yulianto, P. D. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Alokasi Umum (Dau), Dana Alokasi Khusus (Dak), Dana Bagi Hasil (Dbh) Dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) Terhadap Belanja Modal Di Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2013-2020. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 2(2), 620–640. <https://doi.org/10.32477/jrabi.v2i2.489>
- Simbolon, Y. C., Maksum, A., & Abubakar, E. (2020). Pengaruh PAD, SILPA, DAU, DAK dan DBH Terhadap Alokasi Belanja Modal: Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara, Bangka Belitung, Kepulauan Riau dan Bengkulu periode 2012-2018. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 4(2), 826–839. <https://doi.org/10.22437/jssh.v4i2.11546>
- Surakhman, A., Djazuli, A., & Choiriyah. (2019). Pengaruh DAU, DAK, dan PAD terhadap Belanja Modal Pemerintah Kota Palembang. *Kolegial*, 7(2), 150–166.
- Suryana. (2018). Pengaruh PAD, DAU, dan DAK terhadap Belanja Modal. *Jurnal Ilmu Manajemen & Bisnis*, 9(2), 67–74.
- Widajantie, T. D. (2021). PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) TERHADAP BELANJA LANGSUNG (Studi Kasus Pada

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Periode 2016-2018). *Jurnal MEBIS (Manajemen Dan Bisnis)*, 6(1), 31–40. <https://doi.org/10.33005/mebis.v6i1.200>